

Hindari Saber Pungli, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau: Ingat Dampak Pungli Sangat Besar

HermanDjide - SULSEL.INDONESIASATU.CO.ID

Jun 23, 2021 - 15:50



Hindari Saber Pungli, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau: Ingat Dampak Fungli Sangat Besar

PANGKEP -- Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL) hadir dan membuka pelaksanaan sosialisasi peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Rumah sakit Batara Siang Pangkep, Rabu(23/6/21).dan Bupati Pangkep H Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi, M,Si himbau hindari Saber Pungli karena dampaknya sangat besar.

Dalam Acara sosialisasi tersebut dihadiri Dandim 1421 Pangkep Letkol Inf Hengky Vantriardo, Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo dan Turut hadir, Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo dan Kasi Intel Kejari Pangkep.

Dalam sambutannya, MYL menekankan jangan sampai ada pungli d RS Batara Siang maupun di Dinas lainnya, sebab ingat efek pungli sangat besar

dampaknya, bukan hanya pada diri sendiri, tapi keluarga, akibat hukum bahkan pemecatan bagi ASN yang terbukti melakukan pungli.

"Jangan ambil yang bukan hak kita, saya titipkan, tanamkan dalam hati bapak-ibu, jangan mau menambah keuangan keluarga dari jalan pungli. Bekerja dengan baik, beri pelayanan terbaik kepada masyarakat. Insyaallah dimudahkan rejekita,"katanya.

Direktur RS Batara Siang dokter Annas Ahmad menyampaikan, sosialisasi ini merupakan inisiasi dari inspektorat menggandeng instansi Polri, TNI dan Kejaksaan.

Peserta sebanyak 60 orang terdiri dari manajemen, kepala instalasi, kepala ruangan, perwakilan komite medis.

"Kami sangat merespon kegiatan ini, karena kami memang unit pelayanan publik sangat bersentuhan dan sangat rawan terjadinya pungli. Sehingga, pengetahuan saber pungli sangat kami butuhkan sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,"jelasnya.

Kepala inspektorat Pangkep Saiful Yasin mengatakan, sosialisasi ini dilakukan agar tidak terjadi pungutan diluar ketentuan yang ada. Khususnya, di rumah sakit ini sebagai sarana pelayanan publik dilarang melakukan pungutan liar.

"Kami selalu melakukan sosialisasi ini ke OPD dan desa / lurah. Khususnya OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, diharapkan agar tidak ada lagi pungutan yang tidak sesuai ketentuan,"katanya. (herman djide)